KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 5 9 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.4 X Final	
				H.Z N Perilibetulari Ke- 0 11.3 The impatalari				H.5 Tidak Final	
A. IDE	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	AN YAN	G DIPOTONG					
A.1 NPWP : 1 4 8 2 0 3 8 6 2 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 N	lama	KURNIASIH							
B. PP	h PASAL 21	I YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	3	21-402-01		9.343.130	9.343.130	0	5	467.157	
	angan Kode C				bebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	S, Anggota	
B.8	Design to the second se								
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 9 yyyy								
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggalddyyyy									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2									
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	.4 Tanggal : 1 6 dd 0			dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan : HARI JU				ARI JUMADI					
C.6	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				i dengan ketentuan yang onik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

ON0KGSPC